

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KECAMATAN SUNGAI
MANDAU TAHUN 2013**

RINA MARIANA

Email :Rina.mariana98@yahoo.com

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The unitary Republic of Indonesia is responsible to protect all the people of Indonesia and the country of Indonesia with the aim to provide protection to the lives and livelihoods, including the protection of the disaster, Siak Regency is a regency in Riau Province where several sub-district is on the edge outskirts Siak River , which allows the occurrence of disasters, floods and forest fires, floods that hit most of the sub-district in Siak, one of them in the study of floods that occurred at Sungai Mandau District in 2013.

The purpose of this study was to determine how the strategy undertaken by the Regional Government of Siak (Regional Disaster Management Agency, Social Services, Public Health Service) in flood disaster management at Sungai Mandau District 2013. While the method used is qualitative research method, wherein the method This indicates to the research procedures that produce descriptive data that phrase or note made in the form of interviews and documentation were then taken to a conclusion.

Based on the research results, the strategy undertaken by the Regional Government of Siak (Regional Disaster Management Agency, Social Services, and the Department of Health) is by way of cooperation, coordination, and communication. Then in this case there is one factor inhibiting the strategy can work well, among them the lack of planning, lack of facilities or transportation, lack of public awareness so that strategies do not yet well established. Siak government in disaster management, which occurred at Sungai Mandau District has not run well in this case because of the Government of Siak not perform the functions of coordination and management of the government as well.

Keywords: Cooperation, Coordination, Communication.

PENDAHULUAN

Negara kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk atas perlindungan bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai mana yang diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun yang disebabkan oleh faktor non alam dan faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai perpanjangan tangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki tugas pokok sebagai leading sector dalam penanggulangan bencana, selain itu juga berperan sebagai leading sector dalam penyerahan bantuan dan tanggap darurat pasca bencana, seperti pemberian logistic untuk pangan serta mendirikan posko tanggap bencana mulai dari dapur umum, pos kesehatan dan lain sebagainya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional

Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan juga tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berperan sentral pada evakuasi dan proses analisis terhadap bencana sedangkan Dinas Sosial berperan pada penyediaan berbagai fasilitas pokok pasca bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak mempunyai wewenang untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana.

Adapun Defenisi tentang bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak lahir sebagai bentuk proaktif Pemerintah Kabupaten Siak terhadap perubahan paradigma penanggulangan bencana dan kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu meninggalkan pola lama yang berfokus pada tanggap darurat menjadi upaya pemecahan persoalan dari sumber masalahnya serta membuat penanggulangan bencana menjadi bagian tak terpisahkan dari program pembangunan pemerintah, mengingat

sebagian wilayah Kabupaten Siak merupakan wilayah rawan bencana.

Berdasarkan defenisi itu dapat dilihat bahwa peran kedua institusi begitu penting dalam penanggulangan bencana alam khususnya soal penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Sungai Mandau Tahun 2013.

Harian pagi Tribun Pekanbaru, Kamis tanggal 5 Desember 2013 yang lalu, banjir yang menggenangi lima desa dari Sembilan desa yang ada di Kecamatan Sungai Mandau, yaitu Desa Muara Bungkal, Desa Muara Kelantan, Desa Olak, Desa Teluk Lancang dan Desa Lubuk Jering. dari lima desa yang terendam banjir, desa yang terparah yaitu Desa Muara Bungkal.

Bencana banjir yang melanda Kecamatan Sungai Mandau terjadi pada 2013 dimana banjir tersebut telah merugikan masyarakat setempat diantaranya; rusaknya perkebunan, sawah dan matinya peliharaan teknak warga. Banjir yang terjadi pada Tahun 2013 sangat berdampak buruk bagi warga yang biasanya bekerja seperti memotong karet atau menderes karet tidak bisa melakukan aktifitasnya karena tergenangnya perkebunan warga oleh banjir yang melanda di desa tersebut.

Lokasi yang dilanda banjir di Kecamatan Sungai Mandau pada Tahun 2013 dari tabel di atas yang sepanjang aliran Sungai Mandau yaitu desa yang dilanda banjir, Desa Muara Kelantan, Desa Muara Bungkal, Desa Lubuk Jering, Desa Olak, Desa Teluk Lancang.

Dari kelima desa tersebut yang mengalami kerugian masyarakat yang paling banyak adalah Desa Muara Bungkal, karena desa tersebut dataran rendah dan paling dekat dengan aliran Sungai Mandau.

Menurut pemberitaan media adapun penyebab banjir ini terjadi karenahujan deras yang turun terus menerus dan mengakibatkan naiknya permukaan air aliran Sungai Mandau dengan ketinggian mencapai 1-2 meter yang melanda sepanjang hamparan Sungai Mandau. (Tribun Pekanbaru, 5 Desember 2013).

Berdasarkan dari tabel di atas dalam hal ini bantuan yang diturunkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak melalui data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak. Dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi Kabupaten Siak terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian pertama bantuan yang langsung di sumbangkan dan bagian yang kedua bantuan yang dititipkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa tenda pengungsi, tenda posko, mesin Genset Myanmar 3 kw dan valbad (tempat tidur).

Bantuan yang lainnya berupa beras, mie instan, minyak goreng dan lain-lainnya bantuan yang langsung disumbangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.

Telaah Pustaka

Strategi

Strategi adalah keseluruhan langkah (kebijakan-kebijakan) dengan perhitungan yang pasti guna mencapai suatu tujuan atau untuk mengatasi suatu persoalan. (Riyadi dan Deddy S Bratakusumah. 2003 : 68).

Manajemen strategi berkaitan dengan upaya memutuskan persoalan strategi dan perencanaan, serta bagaimana tersebut dilaksanakan dalam praktek.

Manajemen strategi berhubungan dengan proses memilih strategi dan kebijakan dalam rangka upaya memaksimalkan sasaran-sasaran organisasi yang bersangkutan. (Rahardjo Adisasmita. 2011 :53).

Menurut Handyaningrat koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda, agar kegiatan dari bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan. (Handyaningrat, 2002:88).

a. Agar dalam suatu organisasi, unit yang satu tidak melepaskan diri dari unit yang lain.

b. Setiap unit mendapatkan bantuan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhannya.

c. Tidak terjadi rebutan tugas dan wewenang antar unit.

d. Tidak terjadi pertimbuhan dan duplikasi kerja yang merugikan.

(Supomo, 2006:19)

Sedangkan prinsip dari koordinasi menurut Supomo adalah:

1) Adanya wewenang formal dari coordinator.

2) Adanya saling menghormati wewenang antara pemimpin unit dengan koordinator serta antar manajer yang melakukan kerjasama.

3) Terbuka dan saling berkomunikasi dalam menyampaikan dan menerima informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

4) Didukung oleh semua sumber yang ada secara tepat sehingga koordinasi menjadi lebih efektif. (Supomo, 2006:21)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan penulis di Kabupaten Siak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial Kabupaten Siak dan Kecamatan Sungai Mandau.

Informan penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dianggap mampu memberikan keterangan kepada peneliti terkait permasalahan penelitian.

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data tentang, adalah sebagai berikut :

a. Observasi

- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

Dalam pelaksanaan penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan pengelolaan data dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengamatan.

PEMBAHASAN

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Sungai Mandau Tahun 2013

Strategi adalah pola keputusan dalam organisasi yang menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud atau tujuan yang menghasilkan kebijaksanaan utama dan merencanakan untuk pencapaian tujuan serta merinci jangkauan bisnis yang akan dikejar oleh organisasi. Strategi mempunyai suatu pola, metode, maksud atau tujuan dan kebijakan, serta rencana yang penting. Hal ini diperlukan dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dan diharapkan, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan maka dibutuhkan strategi.

Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terhadap kerja sama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi.

Usaha yang dapat dilakukan

untuk mencapai tujuan itu, antara lain dengan memberi intruksi, mengadakan pertemuan untuk memberikan penjelasan, bimbingan atau nasehat dan mengadakan coaching (pelatihan) dan bila perlu memberi teguran. dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir di perlukan strategi agar pelaksanaan penanggulangan ini berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan bersama. Strategi merupakan cara untuk mencapai jangka panjang dan menjadi tindakan untuk menentukan keputusan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 yang merupakan salah satu badan yang mempunyai tugas dan wewenang dalam kegiatan penanggulangan bencana yang terjadi di Kecamatan Sungai Mandau, dan juga sebagai koordinator dalam setiap kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Maka untuk membahas bentuk strategi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Sungai Mandau pada Tahun 2013 ini, penulis akan menjelaskannya:

1. Kerjasama BPBD, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa setiap terjadi bencana banjir antara instansi selalu melakukan kerjasama antara instansi-instansi yang terkait. Ini merupakan bentuk pelaksanaan strategi, koordinasi, dan manajemen antara instansi yang terkait dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Siak.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penanggulangan bencana, khususnya bencana banjir di Kecamatan Sungai Mandau dalam hal ini langsung di tangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, ataupun instansi yang utama atau sebagai komando dalam melakukan tanggap darurat dan menyalurkan bantuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial selalu kerjasama dalam masalah penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Siak.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan dalam penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Siak, dalam hal ini yang terjadi di Kecamatan Sungai Mandau, dalam masalah tanggap darurat dan logistic harus ada kerjasama dalam penyaluran bantuan, baik yang diturunkan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

2. Koordinasi BPBD, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan

Koordinasi adalah proses menyatukan aktivitas dari instansi yang terpisah untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif, tanpa koordinasi orang akan kehilangan pandangan terhadap perannya dalam organisasi secara total dan akan tergoda untuk mendahulukan kepentingan instansi mereka masing-masing dan mengorbankan secara organisasi.

Koordinasi merupakan alat yang sangat penting dalam menjalin komunikasi dan kerjasama dalam melakukan kegiatan-kegiatan organisasi

dan memiliki peranan yang penting dalam penanggulangan bencana banjir hal ini bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Sungai Mandau tahun 2013, dimana dengan adanya rapat ini diharapkan dapat mengambil tindakan yang tepat dan sasaran yang dilakukan sesuai dengan jalur yang telah ditentukan, dan menjadi bahan evaluasi dalam penanggulangan bencana-bencana lainnya baik bencana alam seperti longsor maupun bencana banjir berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan koordinasi dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Sungai Mandau yang mana sebagai koordinatornya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Siak yang selaku badan yang bergerak didepan sesuai dengan laporan dari setiap tempat kejadian bencana dan memberikan arahan kepada instansi atau badan yang terlibat dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Siak khususnya dalam penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Sungai Mandau.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa dalam penanggulangan bencana sangat dibutuhkan koordinasi antar instansi-instansi yang terkait agar dalam melakukan tugasnya bisa berjalan dengan baik.

3. Komunikasi BPBD, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan

Komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media

dan cara penyampain. Sehingga informasi dapat dipahami oleh pihak kedua, serta saling memiliki kesamaan arti lewat transmisi pesan secara simbolik.

Sebagai suatu proses penyampaian informasi, individu yang terlibat dalam kegiatan komunikasi khususnya komunikator perlu merancang dan menyajikan informasi yang benar dan tepat sesuai dengan pengaturan informasi, dan informasi tersebut disajikan dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan situasi komunikasi dan tingkat penerimaan lawan komunikasi.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penanggulangan bencana instansi yang terkait telah melakukan komunikasi dengan instansi yang berada di lapangan, dan dalam pelaksanaan komunikasi sudah berjalan dengan baik.

Faktor-faktor yang menghambat Strategi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Sungai Mandau Tahun 2013.

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir yang dilakukan oleh kedua instansi tersebut ada beberapa faktor yang menghambat dalam strategi yang di buat oleh kedua instansi tersebut, yaitu:

Kurangnya perencanaan

Perencanaan adalah sejumlah keputusan mengenai dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Semakin baik dan terincinya rencana maka akan semakin mudah melaksanakan program-program yang telah direncanakan.

Dalam wawancara diatas dapat dilihat, bahwa dalam pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh instansi tersebut kurangnya perencanaan yang dilakukan sehingga dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik dan tidak adanya program kerja bersama, seharusnya semua instansi/badan yang terlibat dalam satuan penanggulangan bencana dapat lebih mudah untuk menjalankan tugasnya, namun yang terjadi saat sekarang ini dengan adanya rencana kerja sama malah tidak berjalan dengan baik karena dalam hal ini Standar Operasional Prosedur dalam Peraturan Daerah tersebut belum dibuat sehingga instansi berjalan dengan sendiri-sendiri.

Dalam wawancara di atas bisa diambil kesimpulannya bahwa dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Sungai Mandau Pemerintah Kabupaten Siak belum serius untuk melaksanakan program kerjanya, sehingga banjir yang terus melanda Kecamatan Sungai Mandau dan belum adanya antisipasi lanjutan yang seharusnya menjadi acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten Siak dalam melaksanakan strategi tersebut melalui lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Siak.

Kurangnya Sarana atau Transportasi

Sarana atau transportasi dalam suatu badan atau organisasi sangat

diperlukan, apalagi dalam masalah penanggulangan bencana banjir yang kadang-kadang daerah yang terkena bencana banjir tersebut akses jalannya putus itu dibutuhkan alat transportasi yang khusus untuk mencapai daerah bencana banjir tersebut. Dalam hal ini badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Siak kekurangan alat transportasi untuk melakukan penanggulangan bencana banjir.

Dari wawancara diatas bisa disimpulkan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir adalah transportasi untuk menuju ke daerah atau tempat terjadinya bencana. Karena setiap terjadi bencana banjir di Kecamatan Sungai Mandau desa-desa yang terkena banjir akses jalannya akan putus karena jalan tersebut terendam oleh air, jalan satu-satunya untuk menuju desa tersebut hanya bisa di tempuh dengan sampan atau speedboat.

Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kesadaran menunjukkan suatu keadaan jiwa seseorang, yaitu merupakan titik temu dari berbagai pertimbangan sehingga diperoleh suatu keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan dalam jiwa yang bersangkutan.

Sesuai pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa kesadaran juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan. Namun kita juga mengetahui bahwa proses tumbuhnya kesadaran berbeda pada setiap orang. Hal itu tergantung pada kemampuan berfikir, penggunaan rasa perasaan, pertimbangan dan perbandingan.

Dari penuturan salah seorang warga yang terkena banjir tersebut bahwa masyarakat di Desa Muara Bungkal ini sudah biasa pada tahun-tahun sebelumnya terjadi bencana banjir yang mengenai rumah-rumah warga, namun dulu masyarakat tidak ada yang mengungsi dan tidak ada mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab hasil penelitian dan pembahasan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir telah di lakukan oleh pihak-pihak yang terkait, dalam melaksanakan penanggulangan bencana banjir tidak bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, bantuan dari pihak-pihak lain sangat dibutuhkan untuk membantu korban bencana banjir.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak telah melaksanakan strategi yang telah dibuat dalam penanggulangan bencana dengan melakukan kerjasama, koordinasi, dan komunikasi antar instansi-instansi yang terkait belum berjalan dengan baik, karena antara instansi-instansi masih menjalankan tugasnya masing-masing, belum adanya Standar Operasional Prosedur yang membuat sulitnya menjalankan tugas dalam instansi/badan tersebut.

Dalam pelaksanaan strategi ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam menjalankannya, ini dikarenakan masih kurangnya perencanaan, kurangnya sarana Transportasi, dan kurangnya

pemahaman resiko bencana dan kesadaran masyarakat akan pencegahan bencana banjir. Dalam penanggulangan bencana banjir pada tahap rehabilitasi harus dilakukan karena banyak masyarakat yang trauma akan bahaya banjir dan rumah, lingkungannya juga perlu di perbaiki pasca bencana banjir tersebut. Agar masyarakat bisa menjalankan dan menata kehidupannya dengan baik.

Saran

Dalam hal ini masalah banjir merupakan salah satu bencana besar yang tidak bisa dihilangkan begitu saja, namun dapat diminimalisir dampak yang diakibat banjir itu sendiri. Saran yang dianggap perlu untuk direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Siak dalam penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Siak khususnya dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Sungai Mandau, berkaitan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Siak khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial merupakan instansi yang terkait untuk saling bekerjasama dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Sungai Mandau dengan baik, dengan menyediakan sarana dan prasarana transportasi lebih baik lagi.
- b. Pemerintah Kabupaten Siak dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Sungai

Mandau hendaknya melakukan rehabilitasi pada korban bencana pasca bencana banjir tersebut.

- c. Di harapkan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah, desa dan kebersihan Sungai yang ada di desa tersebut, agar tidak terjadinya bencana banjir lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar – Dasar Ilmu Politik, Jakarta.PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hadari Nawawi. (1990). Metode Penelitian Bidang Sosial.Yogyakarta.Gajah Mada University Pers.
- Hadiningrat, Soewarno. (2000). Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen. Gunung Agung, Jakarta.
- Handoko, T Hani. (2003). Manajemen Edisi 2. Yogyakarta: BPFE
- Haw. Widjaja.(2004). Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, Syarifudin. (2002). Metodologi Penelitian. Bandung: Mandar Maju
- Meleong J Lexi. (2002). Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosda Karya : Bandung.

- Manulung, M. (2008). Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nogi Heseel, Tangkilisan. (2004). Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Rahardjo Adisasmita. (2011). Manajemen Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Kanisius.
- Riyadi dan Deddy S Bratakusumah. (2003). Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Subagyo, P. Joko. (2004). Metode Penelitian Kualitatif dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta
- Supomo. (2006), Koordinasi dan Hubungan Kerja. LAN RI. Jakarta.
- Suyanto, Bagong. (2010). Metode Penelitian Sosial. Kencana: Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. (2007). Manajemen Pemerintahan. Jakarta: Perca.
- Syarifudin, Ateng. (2006). Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa. Jati nangor : Seminar dan Loka karya Nasional dikampus STPDN

DOKUMEN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008, Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak.